

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI DI  
KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh :**

**LIHARJA**  
**NIM : 10100116129**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liharja  
NIM :10100116129  
Tempat/Tgl. Lahir : Aranaya, 03 Juli 1998  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Aranaya, Desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala,  
Kabupaten Jeneponto  
Judul :Analisis Hukum terhadap Praktek Nikah Siri di  
Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

**Jeneponto, 20 Juli 2020 M.**  
**29 Dzul Qaidah 1441 H.**

Penulis,

**Liharja**  
**10100116129**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan nikmat dan karuninya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam dihanturkan kepada nabi Muhammad saw, bersama seluruh keluarga dan para sahabatnya, semoga selalu tercurahkan rahmat dan jidayahnya kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini yang berjudul : “Implementasi UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Nikah Siri di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto” dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi tersebut mengalami banyak kesulitan. Namun, berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta do’a dan dukungan oleh kedua orang tua ayahanda Jamaluddin serta ibunda Salinra, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menghanturkan terima kasih kepada :

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M. A. Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta segenap stafnya yang telah mencurahkan perhatian dalam memajukan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd., selaku Dekan I, Dr. Marilang, SH, M.Hum.,selaku Dekan II, serta Dr. Muhammad Saleh Ridwan,. selaku Dekan III Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

3. Dr. Hj. Patimah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Drs. Muhammad Jamal Jamil, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing.HT.,M.S. selaku pembimbing I dan Dr. H. Supardin, M.H.I., selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukannya selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag. selaku penguji I dan Ahkam Jayadi, S.H., M.H. selaku penguji II. Kedua beliau yang telah memberikan banyak masukan serta petunjuk dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Jajaran dosen Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah membimbing dan memandu proses pembuatan skripsi ini maupun perkuliahan sehingga memperluas wawasan keilmuan penulis.
8. Segenap pegawai structural dan segenap staf Fakultas Syariah dan Hukum yang dalam hal ini tidak bisa penulis tuliskan namanya satu-persatu. Terkhusus staf Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah banyak membantu selama penulis menyelesaikan kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
9. Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum beserta segenap stafnya yang telah menyiapkan literasi dan memberikan

kemudahan untuk dapat memanfaatkan fasilitas Perpustakaan secara maksimal demi penyelesaian skripsi ini.

10. Segenap masyarakat Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
11. Kepada Nurul Ainun M, Nur Asia terima kasih atas do'a dan kasih sayang serta motivasi dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama skripsi ini.
12. Suriani, Nurhidayati, Rahmi muliyani, Adelia Ramli, Rismawati yang telah memotivasi, mambantu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.
13. Sahabat-sahabat di Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus kepada jurusan Peradilan Agama Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 tanpa terkecuali, yang selalu memberikan bantuan, serta motivasi untuk selalu berpacu dengan mereka, baik selama perkulihan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman KKN di Desa Balassuka Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa UIN Alauddin Makassar Angkatan 62, Terima kasih atas dukungannya Dan pengalaman berharga saat berada di lokasi KKN.
15. Segenap Adik-adik terbaik Rika, Hasni, Rini, Asmi yang selama penulisan skripsi ini telah memberikan bantuan motivasi, dukungan kepada penulis untuk memaksimalkan dan menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabat di jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 kelas D tanpa terkecuali, yang selalu memberikan bantuan, serta motivasi untuk selalu berpacu dengan mereka, baik selama perkulihan maupun dalam penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya, Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang tak sempat disebutkan satu persatu. Penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah.

Jeneponto, 20 Juni 2020

**LIHARJA**  
**NIM. 10100116129**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
 <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Perkawinan.....	11
B. Pengertian Nikah Siri .....	15
C. Tujuan Perkawinan .....	17
D. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	19
E. Faktor Penyebab Pernikahan Siri .....	23
F. Hukum melakukan Perkawinan .....	25
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	28
C. Sumber Penelitian .....	29

D. Metode Pengumpulan Data .....	29
E. Instrumrn Penelitian .....	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	30
G. Pengujian Keabsahan Data .....	31

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Kecamatan Bangkala .....	32
B. Pandangan Hukum Islam tentang Praktek Nikah Siri dan UU No 1. Tahun 1974.....	38
C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Lebih memilih Nikah Siri .....	40
D. Pendapat Masyarakat Bangkala/Jeneponto tentang Praktek Nikah Siri .....	45

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	49
B. Implikasi Penelitian .....	50

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>53</b>
-----------------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543b/U/1987. Terdapat sejumlah istilah dan kosakata yang berasal dari bahasa Arab dengan huruf hijai'yyah ditransliterasi kedalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin.

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tsa	s	es (dengan titi di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ba
د	Da	d	de
ذ	Dzal	z	zet
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titi di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	n	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	a
إِ	<i>Kasrah</i>	I	i
أُ	<i>Dammah</i>	U	u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf	Nama
ا... / آ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	A	a dan garis di atas
إ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *maata*

قِيلَ : *qiila*

رَمَى : *ramaa*

يَمُوتُ : *yamuutu*

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*. *ta marbutah* harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya [t]. *ta marbutah* harakat sukun, transliterasinya [h]. *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan [ha].

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madiinah al-faadilah*

### 5. Syaddah (Tasydid)

(ﺀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. (ﺀ) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ﺀ), ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanaa	الْحَقُّ	: al-haqq
نَجَّيْنَا	: najjainaa		

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalalah (bukan az-zalzalalah)

## 7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'muruuna	النَّوْءُ	: al-nau'
-------------	--------------	-----------	-----------

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

*Fil Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

#### **9. Lafz al-Jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

Dinullah **الله** billah

#### **10. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Wa ma Muhammadun illa rasul

## ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = subhānahū wa ta‘ālā

Saw. = sallallāhu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘alaihi al-salām

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

## **ABSTRAK**

Pokok masalah penelitian ini adalah Implementasi UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap praktik nikah siri . Adapun permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut : 1). Bagaimana pandangan hukum islam tentang praktik nikah siri dan UU Nomor 1 tahun 1974 2). Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat kecamatan bangkala kabupaten jenepono lebih memilih nikah siri.

Penelitian ini mengkaji tentang praktik nikah siri, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis dan empiris dengan sumber data Profil Kecamatan bangkala, Kabupaten jenepono. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penulisan referensi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Di Indonesia ketentuan yang berkenang dengan peraturan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara indonesia, Aturan perkawinan yang di maksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-undang No.1 tahun 1975. Undang-undang merupakan hukum materil dari perkawinan sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989. Meskipun dari sisi hukum islam nikah siri ini tidak mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum Positif nikah ini dianggap tidak melalui prosedur yang sah karena tidak mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini yaitu.1) Banyaknya masyarakat Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang melakukan perkawinan siri yang di latarbelakangi kurangnya pemahaman masyarakat tentang yurisprudensi hukum indonesia sehingga terjadi perkawinan siri yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum indonesia. Tentu tidak terlepas dari tingkat pendidikan rendah yang berdampak kepada ketidaktahuan mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada atau buta hukum. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi di bidang hukum khususnya di masyarakat Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

2) Bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi biaya pencatatan perkawinan baik di kelurahan dan desa maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkala hendaklah di bebaskan biaya yang penting-penting saja mengurangi biaya pencatatan atau membebaskan biaya pencatatan dan tetap mendaftarkan identitas orang yg melakukan perkawinan pada bukubregistrasi pencatata nikah lalu diterbitkan buku nikah.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Setiap kehidupan manusia didunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menciptakan keluarga/rumah tangga yang rukun, sejahtera, bahagia dan abadi.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan suatu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri secara halal dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan ekstensi manusia diatas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia diatas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh allah SWT kepada hambanya.<sup>2</sup>

Hal ini terbukti pada kenyataan, seperti yang dikemukakan oleh Dr. R. Wirjono Prodjodikoro,SH : “ bahwa diperbolehkan suatu perkawinan antara dua orang-orang yang lanjut usianya, bahwa diperbolehkan pula suatu perkawinan dinamakan “*ex in tremis* “. Yaitu pada waktu salah satu pihak sudah hampir meninggal dunia”.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab yang besar. Jadi, Perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, sebagai ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.

---

<sup>1</sup>Djoko Prakoso,1 ketut murtika. 1987, *Azaz-azaz Hukum Perkawinan Indonesia*. PT Bina Aksara jakarta

<sup>2</sup>Burhanuddin S. 2010. *Menjawab semua Pertanyaan tentang nikah siri*. Pustaka yustisia: yogyakarta.



Masalah perkawinan nikah sirih dalam perspektif hukum islam timbul kontroversi mengenai nikah siri kepada pihak perempuan karna paling banyak menerima dampak negatif dari perkawinan siri ini dibanding pihak laki-laki. Sebelum membahas dampak negatif dari pernikahan siri. Kehamilan luar nikah merupakan aib bagi keluarga sehingga orang tua menikahkan anaknya tanpa melibatkan PPN, tetapi dilakukan mualim atau kyai tanpa melakukan pencatatan buku nikah di pengadilan agama, minimal pemahaman masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pencatatan masih banyak masyarakat Jeneponto belum tau akan pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan dengan pencatatan maupun dengan tidak pencatatan sama saja.

Pernikahan siri atau pernikahan sembunyi-sembunyi sering diartikan oleh masyarakat Jeneponto adalah pernikahan tanpa wali, pernikahan semacam ini selalu dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak perempuan tidak setuju. menganggap pernikahan tanpa wali atau hanya ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi-lagi ketentuan-ketentuan syariat. Kedua pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara.

Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “ perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Abdurrahman, 1996, *perkawinan dalam syariat islam*. (Pt .Rineka Cipta, Jakarta)

Saya akan membahas faktor-faktor yang melatar belakangi dari perkawinan siri pada masyarakat Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto pada umumnya, perkawinan siri yang terjadi di Bangkala menyebabkan ketika seseorang hamil diluar nikah atau tidak adanya restu dari kedua orang tua perempuan penyebabnya dipengaruhi oleh pergaulan bebas, sosial media, dan pengaruh budaya barat yang cepat dipengaruhi oleh anak-anak muda sebagian di masyarakat Bangkala yang menimbulkan fenomena seks bebas ditengah- tengah masyarakat. Walaupun telah ada peraturan pernikahan yang sudah jelas namun pada kenyataanya sering terjadi dalam masyarakat Bangkala yang melanggarnya dan lebih memilih nikah siri.

**Adapun Masyarakat Bangkala yang melakukan pernikahan Siri di antaranya adalah:**

1. Hama dan mintang
2. Samsudin dan dg ngintan
3. Yuseng dan kasi
4. Sambe dan jumri
5. Rosma dan manya

Sesuai dengam rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir batin saja tetapi keduanya. Dengan adanya ikatan lahir batin inilah merupakan perkawinan suatu hukum disamping perbuatan keagamaan dan perbuatan hukum karena perbuatan ini menimbulkan akibat–akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-

masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Khususnya dalam ajaran agama islam misalnya, syarat syahnya perkawinan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan kelamin sehingga terbatas dari zona perzinahan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan dan masa depan manusia .

Hal ini sebagaimana di gariskan dalam al Quran surat Al- isra ayat 17:32  
Yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”<sup>4</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam ajaran agama islam mengatakan bahwa zina adalah perbuatan yang dosa besar, yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan belaka tetapi juga termasuk kejahatan dimana Negara harus melindungi dan wajib memberi sanksi kepada yang melakukannya. Apalagi di masyarakat Bangkala yang mayoritas islam maka hukum islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakat.

Tata cara yang sederhana ini nampaknya sejalan dengan undang no 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 2 berbunyi : “ perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing –masing agama dan kepercayaan itu.”

---

<sup>4</sup>Departement Agama RI, *Al-Qur'an daan terjamahnya* , (semarang karya toha putra semarang 2011.

Perkawinan yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut dengan perkawinan siri. Perkawinan ini hanya dilangsungkan depan penghulu dengan memenuhi syarat Islam sehingga perkawinan ini tidak dapat dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu. Perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan menurut Madzhab Syafi'i adalah:

1. Akad
2. (shiqat Ijab dan qabul).
3. Calon laki-laki dan perempuan
4. Orang tua (wali)

Model perkawinan diatas menurut hukum-hukum islam sudah dianggap sah, namun tidaklah apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan undang- undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelaslah syahnya perkawinan harus di daftarkan oleh PPN ( pegawai pencatatan nikah) atau kepala KUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Tetapi kebanyakan masyarakat Bangkala tidak memperhatikan ketentuan dan peraturan yang sudah diatur Negara serta belum sadar hukum tentang pelaksanaan pernikahan. Sehingga masih banyak masyarakat Bangkala melakukan perkawinan siri tanpa menyadari akibat dari perkawinan yang mereka lakukan itu.

Dari beberapa uraian diatas timbulah masalah yang harus dijawab dalam kaitannya dengan pelaksanaan pernikahan sirih.

## **B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus**

### **a. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “**Implementasi UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Nikah Siri di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto**” Untuk memberikan arah yang tepat terhadap masalah yang dibahas, Penulis memberikan Pengertian kata kata yang berkaitan dengan judul skripsi tersebut.

### **b. Deskripsi Fokus**

1. Dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Bahwa “Perkawinan Merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”
2. Nikah Siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia secara etimologi kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘*alaniyya*’, yaitu terang terangan. Kata siri kemudian digabung dengan kata *nikah* sehingga menjadi nikah siri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi itu memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada masyarakat atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.
3. Perkawinan Menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhon untuk mentaati perintah allah dan melaksnakanya merupakan ibadah.

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dapat di rumuskan Pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum islam tentang praktek nikah siri dan UU No. 1 tahun 1974?
2. Faktor-Faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto lebih memilih nikah siri?

### ***D. Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Bangkala Kabupaten/Jeneponto melakukan pernikahan siri.
2. Untuk mengetahui status hukum nikah siri menurut hukum islam dan UU No. 1 tahun 1974.

### ***E. Manfaat Penelitian***

Dari tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain untuk :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian memberikan masukan dan tambahan informasi kepada masyarakat Bangkala Kabupaten Jenepontong mengenai pernikahan siri.
  - b. Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai pernikahan siri di masyarakat Bangkala Kabupaten Jeneponto.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan informasi tentang sebab akibat hukum nikah siri di masyarakat Bangkala kabupaten Jeneponto.

- b. Mengembangkan keilmuan khususnya kajian-kajian mengenai pernikahan siri khususnya di Bangkala Kabupaten Jeneponto.

## **F. Kajian Pustaka**

Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data-data dari beberapa penelitian sebelumnya dengan penelitian yang berbeda namun sejenis seperti :

1. Skripsi Miftahurrohman di Universitas Islam Sultan Agung dengan judul skripsi : **Nikah Siri dan Hukumnya.**

Penelitian tersebut mencoba meneliti dan mengkaji pendapat mahasiswa FAI UNISULLA Semarang tentang pernikahan siri atau pernikahan tidak melalui KUA atau tidak tercatat serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh seseorang yang melatar belakangi nikah siri sebagai suatu pandangan negatif dikarenakan ingin melindungi kedua belah pihak antara suami dan istri. Apabila salah satu diantara suami dan istri melanggar ikatan pernikahan maka pihak lain tidak bisa menuntut hukum (Negara) yang berlaku , maka hak-hak suami dan istri tidak bisa terjamin secara sosial . jika suami istri terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut hukum maka masalahnya tidak bisa diselesaikan melalui lembaga-lembaga hukum yang ada karena pernikahannya tidak terdaftar.<sup>5</sup>

2. Skripsi Kastiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi: **Nikah Siri dan Kesejahteraan Keluarga**

Penelitian tersebut membahas mengenai nikah siri dan kesejahteraan keluarga merupakan suatu dampak yang bertentangan dengan pandangan hukum Islam dan Negara, seperti yang diketahui bahwa nikah siri merupakan pernikahan secara sembunyi yang tidak tercatat

---

<sup>5</sup> Muhammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan , Darussalam Perum Griya Suryo F-10, Cetakan I, Yogyakarta, Maret 2004, hlm 19

secara resmi, dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntutan agama dan kehidupan keluarga sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat. Selain itu kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja, melainkan mencakup keseluruhan aspek yang didalamnya mengandung unsur ketentraman, artinya keluarga dapat mencukupi segala kebutuhan dan menuju keselamatan serta ketentraman hidup.<sup>6</sup>

3. Skripsi Ratu Sulihat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015 dengan judul skripsi : **FENOMENA PERNIKAHAN SIRRI SECARA ONLINE DI INDONESIA**

Penelitian ini membahas tentang perkawinan *sirri* melalui jasa perkawinan online dalam pandangan ulama NU, MUI, dan Muhammadiyah, dalam skripsi ini penulis memaparkan bahwa dalam jasa perkawinan sirri online ini memberikan pelayanan penyediaan penghulu, saksi dan wali nikah, dengan begitu penulis menyimpulkan perkawinan sirri ini tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan<sup>7</sup>

4. Skripsi Dian Putri Kusumaningsih Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi : **TINJAUAN NORMATIF YURIDIS TERHADAP NIKAH SIRRI YANG DITAWARKAN MELALUI MEDIA ONLINE**

Skripsi ini membahas tentang jasa nikah *sirri* yang ditawarkan secara online dikaji dari undang-undang dan ulama, Dalam skripsi ini

---

<sup>6</sup>Abdurahman al- Jajiry, *Kitab al-fiqh ' ala al-madzahib al-arba'ah* (Mesri: Dar al-Irsyad,t,th), jilid VII.H 4

<sup>7</sup>Ratu Sulihat, *Fenomena Pernikahan sirri secara Online di Indonesia*, (Skripsi\_ UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015)



penulis menjelaskan bahwa penyedia jasa pernikahan sirri online ini bersedia menikahkan dengan ataupun tanpa saksi dan wali nikah seperti yang diyakini oleh mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah.<sup>8</sup>

5. Skripsi Farhan yang berjudul : **PROBLEMATIKA PENERIMAN AKTA NIKAH BAGI PASANGAN NIKAH YANG TERCATATKAN (STUDI KASUS PERKAWINAN TAHUN 1981-1990 DI DESA BARAHAN WATEN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK).**<sup>9</sup>
6. Dalam skripsi tersebut di jelaskan akta nikah yang dipereoleh akibat dari suatu perkawinan yang sah seharusnya telah ada dan diterima oleh pasangan nikah sesaat setelah perkawinan mereka dilangsungkan agar perkawinan mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>8</sup>Dian Putri Kusumaningsih, *Tinjauan Normatif Yuridis terhadap nikah sirri yang di tawarkan melalui media online* (Skripsi \_UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

<sup>9</sup>Farhan, *Problematika Penerimaan Akta Nikah Bagi Pasangan Nikah “Yang Tercatatkan (Studi Kasus Perkawinan Tahun 1981-1990 di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*, Fakultas Syariah UIN Kalijaga Yogyakarta :2009.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### **A. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab *nikah*. Di samping kata *nikah*, dalam bahasa Arab, lazim juga dipergunakan kata *ziwaaaj* untuk maksud yang sama. Kata *nikah* mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata *nikah* itu berarti “berkumpul” sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau” mengadakan perjanjian perkawinan”<sup>10</sup> Dalam pengguna sehari-hari kata *nikah* lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir, yaitu dalam arti kiasan<sup>11</sup> Para ilmu fiqih tersendiri, yaitu para imam masih berbeda pendapat tentang arti kias tersebut, apakah dalam pengertian *wathaa* atau dalam pengertian *aqad* sebagaimana disebut di atas.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi perkawinan itu dapat di pandang sebagai salah satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan yang lain. serta pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan kepada satu dengan yang lainnya. Dalam pandangan islam perkawinan itu merupakan sunna Allah dan Rasul. Sunna Allah berarti menurut qudrat dan iradst Allah dan sunnah rasul adalah tradisi yang diciptkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan juga umatnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Lihat Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, cetakan pertama, 1974, halaman 11

<sup>11</sup>I. Lebih lengkap lihat Ibnu 'Human, *Fat-hu' Qadir*, jilid II, halaman 357;

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003. Hlm, 76

Adapun yang dimaksud dengan nikah dengan konteks Syar'i seperti yang diformulasikan para ulama fiqh. Terdapat berbagai rumusan yang berbeda-beda.<sup>13</sup> Para mujtahid sepakat bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan yang demikian lebih utama daripada haji shalat. Ijtihad dan puasa sunnah. Demikian dengan kesepakatan dengan para imam mazhab. Bagi orang yang sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan telah mempunyai persiapan mustahab untuk melaksanakan perkawinan,

Demikian menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i Imam Hambali berpendapat orang yang sangat berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan dan khawatir berbuat zina wajib menikah, sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi dalam keadaan apapun nikah adalah mustahab, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah untuk beribadah.<sup>14</sup>

Sedangkan perkawinan yang disyari'atkan oleh agama islam dapat dilihat dari 3 sudut pandang yaitu: dari sudut hukum, sosial dan agama. Dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, "mitsaaqaan ghaliizhan" sebagaimana yang disebutkan dalam Qur-'an IV:21. Dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat, orang yang sudah berkeluarga lebih dihargai daripada yang belum berkeluarga. Sedangkan dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga yang suci, sebab pasangan suami isteri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 44

<sup>14</sup> Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2015, hlm. 318

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mengartikan *wathaa* atau setubuh.

1. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan. Ketentuan tersebut adalah undang-undang no 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”

2. Perkawinan menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitzaqaan ghalizhan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya sangat jarang di pakai saat ini.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-fiqh ‘ala Madzhab al-arba’ah oleh Abdurahman Al-jizziriy disebutkan kata “perkawinan” atau nikah secara etimologi adalah (tulisan arab) yang berarti bersenggamaa atau bercampur. dalam pengertian majas orang yang menyebut nikah sebagai aqad, dikarenakan aqad sebab diperbolehkan senggama<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Abdrahmaan Al-jaziry, *Al-fiqh ‘ala Madzahib al-‘Arba’ah*, Jus IV, Bairut :Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1990, hlm.5

### 3. Perkawinan menurut hukum positif

Dalam KUHPerdara tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian tentang perkawinan. Oleh karena itu. Pengertian perkawinan hanya dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum (doktrin) antara lain oleh:

1. Subekti menyatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.
2. Rien G Kartasapoetra mengartikan bahwa perkawinan adalah hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin.<sup>17</sup>
3. Scholten berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan perempuan untuk hidup bersama dengan kekal, yang di akui oleh negara.

Dalam pasal 26 KUHPerdara hanya menyatakan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan. artinya apabila perkawinan telah memenuhi syarat-syarat pokok (intern dan external) menurut hukum perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara maka sudah dianggap sah, ketentuan agama dari kedua calon suami isteri boleh di kesampingkan.

Dengan demikian walaupun pelaksanaan perkawinan telah sah menurut tatacara menurut ajaran agama dari masing-masing kedua calon suami isteri tetap dianggap tidak sah, karena perkawinan hanya ditinjau sebagai lembaga hukum tidak tergantung pada pandangan-pandangan keagamaan calon suami isteri. Hukum terpisah dari agama adalah ciri dari hukum perdata barat yang sekuler dan individualis.

---

<sup>17</sup> Istiqamah *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Gowa Alauddin press,2011), hlm, 71

## **B. Pengertian Nikah Siri**

Secara harfiah “*sirri*” itu artinya (*rahasia*). Jadi, nikah siri adalah pernikahan yang di rahasiakan dari pengetahuan orang banyak. secara umum Nikah siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai dengan aturan agama dalam hal ini ajaran islam. Tetapi tidak dicatatkan di Kantor urusan Agama (KUA). Dikatakan nikah siri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. Jadi nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan petugas resmi yaitu pegawai pencatatan nikah (PPN) dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Seperti yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal kalangan para ulama, Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan dengan sesuai rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari’at, hanya saksi saja diminta untuk tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-‘usry*.<sup>18</sup> Nikah siri yang diartikan menurut terminologi fiqh dilarang menurut hukum islam, karena ada unsur siri (dirahasiakan pernikahannya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan *mudharat*/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya.

Sedangkan menurut Dr Ali al-Harawi, guru besar fikih dan Ushul pada Universitas Amira Yordania adalah:

---

<sup>18</sup><http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/niakahsiri-siri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan-5500ea333115d6f5123e4>.

*Pertama*, Pernikahan yang disetujui oleh kedua mempelai tanpa wali, dua saksi, dan pencatatan resmi. Ulama sepakat bahwa pernikahan ini hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan perwalian dan persaksian.

*Kedua*, Pernikahan yang dihadiri oleh kedua mempelai dan wali tetapi tanpa ada dua saksi dan pencatatan resmi. Pernikahan model ini hukumnya tidak sah menurut mayoritas fuqaha karena tidak sesuai dengan ketentuan persaksian. Ulama yang berani yang mengesahkan model pernikahan ini hanyalah Ibn Abi Layla, Abi Tsaur, Abi Bakar al- Asham, dan Syiah Imamiyyah yang tidak mensyaratkan persaksian. Mereka berpendapat demikian karena berdasarkan pada keumuman ayat “Nikahlah pada perempuan yang kalian suka” (QS.Al-Nisa:3)<sup>19</sup>

*Ketiga*, Pernikahan yang disetujui oleh kedua mempelai dan dihadiri dua saksi tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuan wali dan petugas KUA. Pernikahan ini hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi perwalian.

*Keempat*, Pernikahan yang dihadiri kedua mempelai, wali, dua orang saksi, dan dicatatkan sesuai ketentuan adat istiadat setempat tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh KUA.

*Kelima*, Pernikahan yang dihadiri oleh mempelai, wali dua orang saksi dan tidak dicatatkan, baik dalam catatan adat istiadat setempat maupun KUA.

Dari lima model pernikahan siri disebut dengan istilah *nikah al-‘urfi* namun istilah *nikah al-‘urfi* ( secara bahasa berarti pernikahan yang sudah mentradisi di kalangan masyarakat) lebih populer untuk menyebut model pernikahan yang keempat dan kelima. *Nikah al-‘urfi* yang keempat dan kelima juga disebut dengan nama nika siri jika dirahasiakan dan tidak disertai dengan resepsi pernikahan<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Irwan Masduqi, *nikah sirri* dan istbat Nikah dalam pandangan Lembaga Bahtsul Masail.

<sup>20</sup> Ali al-Harawi, *al-Zuwajj al-‘Urfi bayna Mawqif al-Syar’i wa Nadzrati Mujtama’ wa Ra’yi al-Qunani*, dalam [http:// www. Alrai.com/article/543688.html/](http://www.Alrai.com/article/543688.html/) diakses pada jum’at, 11 januari 2013.

### C. Tujuan Perkawinan

Dilaksanakan nya sebuah pernikahan dalam Islam memiliki tujuan di antaranya adalah:

1. Untuk membentengi akhlak yang luhur dan martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji. Yang telah menurunkan dan membodohkan matabat manusia yang luhur, Maka Islam memandang bahwa perkawinan merupakan sarana efektif unruk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan. Dan melindungi masyarakat dari kekacauan.
2. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Disebutkan dalam AI-Qur'an bahwa Islam membenarkan adanya talak (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi memprtahangkan rumah tangganya. Misalnya surat Al-Baqarah (2) ayat 229-230. Ayat ini ini menunjukan bahwa tujuan dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ ۚ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ ۚ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتَبِئْتُمْوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ۚ ۲۲۹ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ ۙ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۚ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَا جَعًا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۚ ۲۳۰

Terjemahannya

229. Talak (Yang Dapat Dirujuk) Itu Dua Kali. (Setelah Itu Suami Dapat) Menahan Dengan Baik, Atau Melepaskan Dengan Baik. Tidak Halal Bagi Kamu Mengambil Kembali Sesuatu Yang Telah Kamu Berikan Kepada Mereka, Kecuali



Keduanya (Suami Dan Istri) Khawatir Tidak Mampu Menjalankan Hukum-Hukum Allah. Jika Kamu (Wali) Khawatir Bahwa Keduanya Tidak Mampu Menjalankan Hukum-Hukum Allah, Maka Keduanya Tidak Berdosa Atas Bayaran Yang (Harus) Diberikan (Oleh Istri) Untuk Menebus Dirinya. Itulah Hukum-Hukum Allah, Maka Janganlah Kamu Melanggarnya. Barangsiapa Melanggar Hukum-Hukum Allah, Mereka Itulah Orang-Orang Zalim.

230. Kemudian Jika Dia Menceraikannya (Setelah Talak Yang Kedua), Maka Perempuan Itu Tidak Halal Lagi Baginya Sebelum Dia Menikah Dengan Suami Yang Lain. Kemudian Jika Suami Yang Lain Itu Menceraikannya, Maka Tidak Ada Dosa Bagi Keduanya (Suami Pertama Dan Bekas Istri) Untuk Menikah Kembali Jika Keduanya Berpendapat Akan Dapat Menjalankan Hukum-Hukum Allah. Itulah Ketentuan-Ketentuan Allah Yang Diterangkan-Nya Kepada Orang-Orang Yang Berpengetahuan.

Sedangkan Mengenai tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang berpegang kepada rumusan pasal I, yaitu pada anak kalimat kedua yang berbunyi : “ dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, Rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga perkawinan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut.

Sedangkan dalam ajaran agama islam mensyari’atkan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta untuk memperoleh keturunan yang sah. Dalam firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum/30:21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan (kebesaraan)-nya ialah dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir).<sup>21</sup>

#### **D. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera untuk melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan memelihara diri dari perbuatan zina, Perkawinan merupakan wadah diri penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran agama Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunah beliau. Karena itulah perkawinan dan syarat nilai yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Mawadah, warahma. Dan perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyaratkannya perkawinan tercapai.<sup>22</sup>

##### **1. Rukun Perkawinan**

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu yang melangsungkan perkawinan. Jadi rukun perkawinan terdiri atas:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita
- b. Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan
- c. Harus di saksikan oleh dua orang saksi
- d. Akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan wakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Rukun perkawinan merupakan bagian daripada

---

<sup>21</sup> Asmin, *Status Perkawinan antar agama ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, hlm.28

<sup>22</sup> Nunung Rodliyah, *Pokok-Pokok Hukum Islam Di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung, Gunung Pesagi, 2009, hlm. 144.

hakekat perkawinan, artinya apabila salah satu rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan.

Syarat Perkawinan, Syarat nikah menurut agama Islam diperinci ke dalam syarat-syarat mempelai laki-laki dan syarat-syarat mempelai wanita adalah sebagai berikut:

Syarat bagi calon mempelai laki-laki:

1. Beragama Islam
2. Terang laki-lakinya (bukan banci)
3. Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
4. Tidak beristri lebih dari empat orang
5. bukan mahramnya bakal istri
6. tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya
7. mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahnya
8. tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.<sup>23</sup>

Syarat bagi calon mempelai wanita:

1. Beragama Islam
2. Terang perempuannya (bukan banci)
3. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya
4. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
5. Bukan mahram bakala suami
6. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
7. Terang orangnya
8. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Kementerian Agama. *Op.cit.*, h.38-39.

Syarat-syarat ijab abul :

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya seorang laki-laki muslim, baliq, sehat dan adil ( tidak fasik).

Syarat-syarat saksi :

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki. Mulo, baliq, berakal. Melihat dan mendengar serta mengerti (PAHAM) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut hanafi dan hambali boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan stu orang perempuan.

Beberapa syarat-syarat saksi sebagai berikut:

1. Berakal bukan orang gila
2. Baliq, bukan anak-anak
3. Mereka bukan budak
4. Islam
5. Kedua orang saksi itu mendengar

Tidak dipenuhinya syarat-syarat nikah tersebut diatas maka berakibat batal atau tidak sah (fasid) nikahnya. Sedangkan syarat perkawinan menurut Tan Kamello dalam bukunya yang berjudul *Hukum Orang dan keluarga*, bahwa syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari syarat substantif dan syarat ajektif. Syarat substantif adalah syarat-syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami dan calpn istri, sedangkan syarat ajektif adalah syarat yang berhubungan dengan tat cara formalitas perkawinan yang di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya.

Persyaratan substantif tersebut adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan (kata sepakat) calon suami dan istri (Pasal 6 ayat (1));
2. Umur dari calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun (pasal 7 ayat (1)); Jika belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal diperoleh oleh wali, dan jika tidak wali diperoleh izin pengadilan setempat;
3. Calon istri tidak terikat pada pertalian perkawinan dengan pihak lain (pasal 3, 9,)
4. Adanya waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya apabila akan melangsungkan perkawinannya yang kedua (pasal 11 jo Op No, 9 tahun 1975);
5. Calon suami dan istri memiliki agama yang sama.

Persyaratan ajektif adalah sebagai berikut:

1. Kedua calon suami-istri atau kedua orangtua atau wakilnya memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan secara lisan atau tertulis.
2. Pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan meneliti semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas calon suami-istri.
4. Pengumuman tentang waktu dilangsungkan perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan untuk diketahui umum, Lazimnya ditempel pada

---

<sup>25</sup>Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Op.Cit.*, hlm. 44.

papan pengumuman di kantor tersebut agar mudah dibaca oleh masyarakat.

5. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman.
6. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat dan di hadir 2 orang saksi.
7. Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua calon suami istri, diikuti saksi dan pegawai pencatat. Akta perkawinan dibuat dalam dua rangkai. Helai pertama disimpan oleh pencatat, Helai kedua disimpan di panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan tersebut kepada suami-istri diberikan kutipan dalam perkawinan.

#### **E. *Faktor Penyebab Pernikahan Siri***

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahnya di PPN adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan dibawah umur disebabkan hubungan badan diluar nikah
2. pendidikan rendah/tidak pernah duduk dibangku sekolah sama sekali
3. Faktor ekonomi juga mempengaruhi mengapa seseorang lebih suka menikah siri di pengulu-penghulu tidak resmi, karena tidak mampu membayar administrasi pencatatan.
4. Pernikahan usia muda terkait dengan hak orangtua atau wali, untuk menikahkan anaknya tanpa di sertai kemauan anak itu tersendiri, dalam beberapa kasus di masyarakat karena alasan hubungan kekeluargaan untuk mempertahankan status sosial orangtua sering kali menjodohkan atau bahkan menikahkan anak mereka dengan anak saudaranya sejak masih belia.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Musthafa al-siba'i *perempuan di antara hukum islam dan perundang-undangan*, hlm,81.

5. Nikah siri sering dilakukan karena faktor biaya dan kebutuhan batin, tidak mendapatkan kepuasan dari pasangan.
6. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, masih banyak di antara masyarakat kita yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan.
7. Nikah siri dilakukan sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan isteri yang ada tidak dikarunia anak. Apabila nika secara resmi akan terkendala dengan UU maupun aturan yang lain, baik yang menyangkut perkawinan maupun jabatan.
8. Nikah yang tergolong nikah siri adalah pernikahan yang tidak diumumkan dengan *duff* atau membakar sesuatu (sampai terlihat asap) sebagai tanda adanya pernikahan. Nikah *siri* dalam bentuk ini pernah dinyatakan oleh Rasulullah saw. Dan Umar bin al-Khattab, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, yaitu ketika Rasulullah saw. Melewati suatu kaum terdengar suara nyanyian, seraya bertanya “*suara apa itu*” Kemudian Umar bin al-Khattab bertanya, “*pernikahan seseorang*”. Rasulullah saw. Pun berkata, “*sempurnalah agamanya. Tidaklah tergolong nikah siri setelah ditabuh duff atau kelihatan asap*”.<sup>27</sup>
9. Nikah siri sering terjadi untuk menghindari perbuatan asusila bagi pasangan kekasih untuk menghindarkan diri dari perbuatan asusila. Daripada tergoda dengan perbuatan dosa. Mereka lebih memilih menikah siri karena dianggap sebagai solusi yang paling baik. baik bagi kedua belah pihak.

---

<sup>27</sup>Imam Anas ibn Malik, *al-Mudawwanah al-kubra*, (Beirut: Dar al-Shadir.tth). Juz IV, hlm.194; Ahmad ibn Sya'ib Abu ;Abd al-Rahman al-nasa'i, sunan al-nasa'i, sunan al-nasai al-kubra, (Beirut:Dar al-Kutub al-Imiyyah,1991),juz III, hlm 331.

10. Nikah siri juga sering terjadi karena ingin serba praktis tanpa dan tidak harus repot mengurus surat-surat persyaratan pernikahan yang dianggap berbelit-belit.

#### ***F. Hukum Melakukan Perkawinan***

Hukum melakukan Perkawinan menurut jumhur ulama bahwa perkawinan itu hukumnya adalah sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat perkawinan itu hukumnya wajib. Ulama Malikayah Mutaakhirin berpendapat bahwa perkawinan itu wajib bagi sebagian orang. Sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan orang.

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum perkawinan itu menurut asalnya adalah sunna menurut pandangan jumhur ulama. Hal ini berlaku secara umum, namun karena ada tujuan yang mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

1. Sunnat

Bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melaksanakan perkawinan.<sup>28</sup>

2. Makruh

Bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk

---

<sup>28</sup>Amir syarifuddin Garis- garis Besar fiqh prenada media hlm, 79/80



perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.

3. Wajib

Bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin.

4. Haram,

Bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara'. Sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

5. Mubah,

Bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudaratan apa-apa kepada siapapun.

### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

## ***A. Jenis dan lokasi penelitian***

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini pada hakikatnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan ilmiah baik untuk keperluan pengumpulan data, dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau biasa disebut penelitian lapangan yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

Penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari pandangan tokoh masyarakat maupun informasi lain terhadap pernikahan siri dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia. Suatu objek suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini. Peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis sebab akibat tentang fenomena yang ada di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto tentang nikah siri. Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara, dokumen resmi dan berkas-berkas perkara.

Hasil dari penelitian ini ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu dengan tujuan penelitian ingin memperoleh pemahaman yang mendalam di balik fenomena yang berhasik diperoleh peneliti, Sehingga penelitian ini dapat memberikan kevalidaan terhadap hasil penelitian.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang bahwa dipilihnya Kecamatan Bangkala karena penduduknya mayoritas beragama islam sehingga pelaksanaan perkawinan ada yang tercatat dan ada pula yang tidak tercatat, sehingga membuat menarik untuk dikaji dan sesuai dengan tahapan hukum yang berlaku yang ditentukan oleh undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

### **B. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan empiris, yang digunakan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan khususnya pernikahan siri di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum bukan semata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggojolak dan memperoleh dalam kehidupan masyarakat.

Metode pendekatan tersebut menurut saya memiliki relevansi dengan judul yang di ambil peneliti dengan berpegang ketentuan normatif, dalam penelitian ini materi pokok kajian yaitu masalah pernikahan siri menurut undang-undang nomor 1 tahun 1945 tentang perkawinan.

### ***C. Sumber data***

Adapun beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

#### **a. Untuk data primer**

Data primer adalah data utama yang saya lakukan yang secara langsung dikumpulkan dari sumber yang mendasar mengenai perkawinan siri yang secara langsung dari informasi yang didapatkan di masyarakat Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

#### **b. Untuk data sekunder**

Data sekunder yaitu data pelengkap dalam suatu penelitian yang diangkat yang telah tersusun dalam bentuk-bentuk dokumen dan studi pustaka dengan membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan objek yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### ***D. Metode pengumpulan data***

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu suatu dialog atau komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, serta dalam penelitian yang saya angkat menggunakan metode pengumpulan data jenis wawancara tidak terstruktur yaitu memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan peneliti, bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, dalam hal ini responden yang di wawancarai adalah hama dan mintang di karenakan mintang hamil diluar nikah dan mereka melakukan pernikahan siri di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Oleh pencatat nikah dan tokoh ulama setempat.

## 2. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata sebagai alat bantu utamanya adalah pancaindera lainnya seperti telinga penciuman dan mulut. Karena itu, observasi yang di lakukan di kecamatan bangkala kabupaten jeneponto adalah kemampuan seseorang dengan menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku, majalah artikel, arsip-arsip catatan, transkrip dan lain sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan kecamatan bangkala kabupaten jeneponto.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dan sumber-sumber informasi.

### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang di kumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
2. Komperatif yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan.
3. Dedukatif yang pada umumnya berpdoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. *Profil Kecamatan Bangkala***

##### **1. Geografis**

Kecamatan Bangkala Merupakan salah satu dari 11 Kecamatan di kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan kabupaten Gowa disebelah utara, Kecamatan Tamaletea di sebelah timur, Kecamatan Bangkala Barat di sebelah barat dan laut Flores disebelah selatan. Sebanyak 5 Desa/Kelurahan di Kecamatan Bangkala bukan merupakan daerah pantai yang bukan 9 Desa/Kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi atau ketinggian dari permukaan laut yang beragam. Menurut jaraknya, maka letak masing-masing desa/kelurahan ke ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten sangat bervariasi. Jarak desa/kelurahan ke ibukota kecamatan maupun ibukota kabupaten berkisar 0-16 km. Untuk jarak terjauh dari ibukota kecamatan Benteng adalah desa marayoka yaitu sekitar 16 km, sedangkan untuk jarak terdekat adalah kelurahan Benteng.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Siti Hajrah, *Koordinator Statistik kecamatan Bangkala*, Data Geografi kecamatan Bangkala 2019

**Tabel 1. Letak dan Luas Wilayah Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto**

*Sumber: Kantor Kecamatan Bangkala*

No	Desa Kelurahan	Luas Wilayah	Presentase %
1.	Mallasoro	7,95	6,53 %
2.	Punagaya	8,40	6,90 %
3.	Bontorannu	8,38	6,88 %
4.	Panta Bahari	5,00	4,10 %
5.	Pallengu	5,00	4,10 %
6.	Tombo-tombolo	3,13	2,57
7.	Jennetallasa	5,88	4,83 %
8.	Kalimporo	7,63	6,26 %
9.	Benteng	5,19	4,26 %
10.	Pallantikang	12,70	10,43 %
11.	Gunung silanu	12,50	10,26
12.	Kapita	21,81	17,90
13.	Marayoka	14,12	11,60



14.	Bontomanai	4,12	3,38
-----	------------	------	------

## 2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Bangkala pada Tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi setiap tahun, hasil registrasi pada nampak bahwa jumlah penduduk di akhir tahun 2014 sekitar 52.220 jiwa namun pada tahun 2015 naik menjadi sekitar 52.794 jiwa, meningkat kembali pada tahun 2016 sekitar 53.356 jiwa pada tahun 2017 naik menjadi 53.877 jiwa, dan pada tahun 2018 menjadi 54.425 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki tahun 2018 sebanyak 26.588 jiwa dan perempuan sebanyak 27.837 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 95 yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 95 orang penduduk laki-laki.<sup>30</sup>

Desa terpadat di kecamatan Bangkala pada tahun 2014 sekitar 785 jiwa per km, sedangkan tahun 2015 sekitar 793 jiwa per km, tahun 2016 sekitar 438 jiwa per km, tahun 2017 sekitar 442 jiwa dan tahun 2018 sekitar 447 jiwa kepadatan per km. Ditinjau menurut desa/kelurahan, maka kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Tombo-tombolo yaitu 857 jiwa per km, menyusul Desa Pallengu sekitar 841 jiwa per km, dan Desa Bontomanai sekitar 704 jiwa per km, selanjutnya desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Desa Marayoka sekitar 232 jiwa per km.

---

<sup>30</sup> Siti Hajra, *Koordinator Statistik Kecamatan Bangkala, Data Penduduk 2014/2018*

**Tabel II. Penduduk Kecamatan Bangkala Menurut Desa, Jenis Kelamin, Dan Sex Rasio**

Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Rasio
	Laki-laki	Perempuan		
Mallasoro	2.296	2.386	4.682	96
Punagayya	2.031	2.089	4.120	97
Bontorannu	2.455	2.542	4.997	97
Panta Bahari	1497	1.566	3.053	96
Pallengu	1.995	2.211	4.206	90
Tombo tombol	1,361	1.322	2.683	103
Jenetallasa	1.879	1.963	3.842	96
Kalimporo	1.896	2.001	3.897	95
Benteng	1.560	1.752	3.312	89
Gunung silanu	1.641	1.623	3.264	101
Kapita	2.296	2.755	5.454	98
Marayoka	1.575	1.706	3.281	92
Bontomanai	1.439	1.460	2.899	99
Pallantikang	2.264	2.471	4.372	92

*Sumber: Kantor Kecamatan Bangkala*

**Tabel III. Penduduk dan Rumah Tangga Desa di Kecamatan Bangkala**

No	Nama Desa/Kelurahan	Penduduk	Rumah Tangga
1	Mallasoro	4.682	1.061
2	Punagaya	4.120	980
3	Bontorannu	4.997	1.140
4	Pantai Bahari	3.053	1.207
5	Pallengu	4.206	732
6	Tombo-tombolo	2.683	1.245
7	Jenetallasa	3.442	668
8	Kalimporo	3.897	991
9	Benteng	3.312	601
10	Pallantikang	4.735	895
11	Gunung silanu	3.264	764
12	Kapita	5.454	971
13	Marayoka	3.281	726
14	Bontomanai	2.899	648

*Sumber: Kantor Kecamatan Bangkala*

### **3. Pemerintahan**

#### **a. Aparat Pemerintahan**

Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Bangkala di laksanakan oleh sejumlah aparat pemerintah/pegawai negeri yang berasal dari berbagai dinas/instansi pemerintah yang keseluruhannya berjumlah 205 orang terdiri atas 113 laki-laki dan 92 orang perempuan.

b. Perkembangan Desa/Kelurahan

Tingkat klasifikasi desa/kelurahan di kecamatan Bangkala pada tahun 2018 terdiri dari 9 kelurahan dengan klasifikasi Swakarya dan 5 desa lainnya tergolong Swasembada. Dengan demikian tidak ada lagi des/kelurahan yang termasuk Swadaya.

**3. Perekonomian**

Pertanian merupakan sektor utama lapangan usaha bagi mayoritas masyarakat di kecamatan Bangkala. Dari hasil sensus pertanian pada tahun 2018 jumlah rumah tangga yang menghasilkan perkebunan 12.487 sedangkan rumah tangga yang menghasilkan penggilingan padi 196, rumah tangga yang menghasilkan gula merah sebanyak 96, rumah tangga yang menghasilkan Anyaman 136. Dan banyaknya usaha koperasi di kecamatan Bangkala Kabupaten jeneponto<sup>31</sup>

Sebagian masyarakat Bangkala di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto pada tahun 2016 juga berusaha di sektor peternakan seperti budidaya ternak kuda, sapi, kambing, dan kerbau. Utmuk unggas banyak yang di budidayakan, antara lainnya. Ayam, Daging ayam bertelur, Ayam Kampung dan unggas lainnya.

Sementara itu tidak sedikit di Kecamatan Bangkala yang merantau keluar kota dengan tempat tinggal menetap, Masyarakat sebagina berprofesi sebagai buruh bangunan, pegawai pabrik, berwiraswasta, dan pekerja rumah tangga. Ada pula pyla bekerja di bidang Pegawai negeri sipil Polisi dan TNI.

---

<sup>31</sup> Siti Hajrah, *Koordinator Statistik Kecamatan Bangkala*, Data Perekonomian di Kecamatan B

#### **4. Pendidikan**

Pendidikan merupakan sarana penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, untuk di perlukan prasarana pendidikan yang bagus dan representatif guna mendukung wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Di Kecamatan Bangkala terdapat fasilitas pendidikan mulai dari sekolah (Taman Kanak-Kanak) hingga SLTA.

Jumlah sekolah pada tahun 2017/2018 jumlah Tk di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto 12 sekolah tingkat SD, baik SD Negeri maupun SD Swasta sebanyak 46 sekolah untuk tingkat SLTP sebanyak 8 sekolah, dan untuk tingkat SLTA sebanyak 3 sekolah. Selain itu pula sekolah yang berada di bawah naungan Kementrian Agama, yaitu Madrasah Ibtidaiya 9 sekolah, sedangkan Madrasah Tsanawiyah 9 sekolah, serta Madrasah Aliyah 5 sekolah<sup>32</sup>

#### ***B. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktek Nikah Siri Dan UU No. 1 Tahun 1974***

Dalam masyarakat Indonesia salah satu bentuk perkawinan yang dikenal adalah Nikah Siri yaitu nikah yang dilakukan secara diam-diam, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak di catatkan pada petugas pencatatan Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah seperti ini sesuai dengan hadits rasul dimana rasul menyuruh masyarakat indonesia. Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pasal 2 Ayat (1) dengan sangat jelas dan tegas menyebutkan “ suatu perkawinan sah apabila di lakukan menurut masing-masing

---

<sup>32</sup> Siti Hajra, *Koordinator Statistik Kecamatan Bangkala*, Data Pendidikan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

agama dan kepercayaannya”. Dilanjutkan dengan pasal 2 (2). Bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan UU yang berlaku.

Pengertian Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menetapkan perkawinan berdasarkan ketuhanan yang maha esa dapat di tafsirkan 2 hal berikut:

1. Di dalam negara republik Indonesia yang berdasarkan pancasila tidak boleh terjadi dan berlaku “ Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan ajaran dan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang Islam. Dan demikian pula bagi orang-orang yang beragama Nasrani, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu tidak terjadi dan berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan ajaran dan kaidah-kaidah agama mereka.
2. Terjadinya akad perkawinan menurut hukum masing-masing (Pasal 1 (1) UU No. 1 Tahun 1974). Adalah merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum tidak bisa dianulir adanya peristiwa penting yang di tentukan pada pasal 2 ayat (2) bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 2 perumusan pada pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu sesuai dengan UU Negara Republik Indonesia 45.

Sedangkan menurut Diktum dalam Pasal KHI mencantumkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Dengan demikian Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun Pencatatan Nikah tidak terkait dengan sah dan tidaknya akad perkawinan, karena pencatatan bukan peristiwa hukum, melainkan peristiwa diperlukan untuk:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat, pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatatan Nikah (PPN) sebagaimana diatur oleh UU No 22 tahun 1946. Dan UU No. 32 tahun 1954.
- 2) Agar ada jaminan ketertiban, maka Pasal 6 KHI merumuskan: untuk memenuhi pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

Adapun akibat dari perkawinan siri ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Nikah siri yang tidak tercatat pada pejabat pencatat nikah (PPN) atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kua (KUA) dan apabila tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama, maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan ilegal formal, dan tidak ada akibat hukum. Nikah siri dapat merugikan istri dan anak.

### ***C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Lebih Memilih Nikah Siri***

Praktek nikah siri yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi dari hasil wawancara. Dan penulis memperoleh data dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan siri adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi rendah atau miskin yang jadi pemicu yang luar biasa, ekonomi yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktek nikah siri selalu bertambah. Karena mereka beranggapan bahwa biaya menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Memerlukan

biaya sangat tinggi, sehingga bagi mereka yang berpenghasilan rendah merasa terbebani biaya tersebut. Sedangkan pekerjaan dari bapak yasbir hanyalah Petani yang berpenghasilan tidak seberapa sedangkan istrinya hanya IRT. Inilah yang terjadi di keluarga bapak yasbir dan ita.<sup>33</sup>

2. Hamil diluar nikah yang terjadi di masyarakat. Seperti pergaulan bebas maraknya informasi pornografi dan keluarga yang tidak harmonis. Akan memicu terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan. Seperti hamil diluar nikah ketika hal ini terjadi, maka keluarga harus menanggung malu yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Maka menikah secara siri menjadi pilhan dari keluarga S.dan H.<sup>34</sup>
3. Menikah dibawah umur yang dilakukan oleh ibu Jumriati karena faktor paksaan kedua orang tuanya. Karena pada waktu itu kedua orang tuanya memiliki beban ekonomi dan perkawinan dianggap sebagai solusi paling ampuh untuk mengurangi beban kedua orang tuanya. Karena lazimnya setelah menikah kebutuhan hidupnya ditanggung oleh suami.<sup>35</sup>
4. Mahalnya uang panai jadi salah satu yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bangkala. Mahalnya uang panai yang diminta oleh kedua orang tua istrinya Sehingga bapak H tidak mampu untuk mengabulkan permintaan dari kedua orang tua istrinya. karena pekerjaan bapak H hanya seorang penjual ballo. Sehingga bapak H mengambil jalan pintas untuk mengajak istrinya untuk melakukan Silariang karena ini jalan satu-satunya untuk bersatu dengan istrinya.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan bapak Yasbir, Desa Bontomanai, 10 Juli 2020.

<sup>34</sup> Wawancara dengan keluarga S dan H, Desa Marayoka 10 Juli 2020.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Jumriati, Desa Pallantikang 10 Juli 2020.

<sup>36</sup> Wawancara dengan bapak H, Desa Tombo-Tombolo 10 Juli 2020.



5. Tidak adanya restu dari kedua orang tua karena ada hubungan keluarga antara bapak Sambe dan Ibu Mintang, Karena ibu mintang keponakan dari kedua orang tua bapak sambe. Sehingga tidak diberikan restu bagi keduanya karena tidak baku cocok antara sambe dan mintang, Tapi bapak sambe tidak kehabisan akal untuk mendapatkan ibu mintang untuk menjadi istrinya. Diajaklah istrinya kawin lari dan dia melakukan perkawinan siri di papua.<sup>37</sup>
6. Tradisi setempat atau kebiasaan salah satu faktor maraknya perkawinan siri. Tradisi yang biasa berkembang di masyarakat Bangkala tepatnya di desa Kapita Baso beranggapan bahwa menolak lamaran maka sang anak akan jauh dari jodoh Pemikiran sempit semacam ini justru akan menimbulkan banyaknya praktek nikah siri yang tidak bisa terkendalikan di desa kapita.<sup>38</sup>
7. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Sebagian besar kalangan masyarakat Kecamatan Bangkala hanya di pahami secara sah menurut agama saja. Dimana ketika syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan dalam fikih terpenuhi maka dianggap sudah cukup tanpa mengindahkan aturan UU perkawina yang berlaku di indonesia, yaitu pencatatan pernikahan.  
  
Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pernikahan tentu tidak terlepas dari tingkat pendidikan rendah yang berdampak pada ketidaktahuan mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada atau buta hukum. Hal ini jelas terlihat ketika peneliti melakukan wawancara dengan responden, seperti Yuseng, K dan R.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan bapak sambe dan keluarganya di Kelurahan Bontorannu 10 Juli 2020.

<sup>38</sup> Wawancara dengan bapak Baso, di Desa Kapita, Sabtu 11 Juli 2020.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Yuseng dan K, di Kelurahan Paellengu Sabtu 11 Juli 2020

Dari hasil wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mereka tidak mengetahui aturan pernikahan yang resmi, keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) dan fungsinya serta biaya yang harus mereka keluarkan ketika akan melakukan dan mencatatkan pernikahan.

Untuk menanggulangi Permasalahan ini. Maka upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan sosialisasi hukum terhadap urgensi pencatatan pernikahan dan dampak yang dihasilkan ketika pernikahan tersebut tidak dicatatkan, Hal ini penting untuk segera diupayakan agar peraturan yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya, di patuhi dan memiliki kewibawaan.

8. Perkawinan siri terjadi kepada H karena telah melakukan perkawinan sebanyak 3 kali dan merupakan isteri ke 4 ia melakukan perkawinan siri agar tidak ketahuan oleh istrinya yang lain. alasanya melakukan perkawinan siri karena alasan pekerjaan. H ditugaskan diluar daerah selama 1 tahun dan jauh dari istri-istrinya yang sah. Sehingga H melakukan perkawinan siri beda daerah itu karena kebutuhan batin dan pemunahan kebutuhan seksual.<sup>40</sup>
9. Nikah siri yang dilakukan dari C karena faktor beda agama (keyakinan). B seorang beragama Islam sedangkan si calonya beragama Katholik. Alasan dari B untuk melakukan perkawinan siri karena calonya sudah hamil di luar nikah dan jalan satu-satunya untuk tidak menimbulkan fitnah dari tetangganya C melakukan perkawinan siri di kelurahan Bontorannu.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan H. di Kelurahan Pantai Bahari, Sabtu 11 Juli 2020

<sup>41</sup> Wawancara dengan C. di Desa Kalimporo, Sabtu 11 Juli 2020

10. Perkawinan siri juga sering terjadi karena faktor tidak mempunyai keturunan dari istri sahnyanya sehingga K melakukan perkawinan siri karena ingin mempunyai keturunan bila ia menikah lagi. K menikahi janda sebelah kampung karena K yakin apabila dia menikahi janda maka dia cepat mendapatkan keturunan.<sup>42</sup>
11. Faktor penyebab pernikahan siri S adalah karena persoalan adanya nafkah batin seorang wanita sehingga ia ikhlas untuk di jadikan istri siri. Alasannya adalah bahwa sebagai perempuan ia telah memiliki segalanya sehingga yang ia butuhkan hanya nafkah batin saja.<sup>43</sup>
12. Pernikahan siri terjadi karena faktor untuk penjagaan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah untuk menceraikannya tanpa harus melawati perosedur yang berbeli-belit di persidangan. Wawancara dengan Kamaria di Desa Gunung Silanu.<sup>44</sup>
13. Nikah siri memang sering di lakukan karena memang tidak tahu dan tidak mau tahu tentang prosedur hukum. Hal ini terjadi pada keluarga Sampara ia beranggapan di Kelurahan Punagaya yang terletak di daerah yang terpencil jauh dari wilayah dan kota tidak perlu di catatkan pernikahan di KUA. Yang penting sudah memenuhi rukun pernikahan itu sudah di anggap sah oleh bapak sampara<sup>45</sup>
14. Faktor pernikahan siri terjadi karena faktor tidak ada restu dari kedua orang tua dan keluarga. Ibu Kennang menceritakan kenapa dia lebih memelih nikah siri daripada menikah sah secara hukum.di sebabkan Karena suaminya dari keluarga biasa sedangkan ibu kennang sendiri

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan K. di Desa Jennetallasa, Sabtu 11 Juli 2020

<sup>43</sup> Wawancara dengan S di Desa Mallasoro Sabtu 11 Juli 2020

<sup>44</sup> Wawancara dengan Kamaria di Desa Gunung Silanu Sabtu 11 Juli 2020

<sup>45</sup> Wawancara dengan Sampara di Kelurahan Punagaya Minggu 12 Juli 2020

dari keluarga karaeng ( terpendang) sehingga dia tidak diberi restu oleh kedua orang tuanya. Tapi ibu kennang dan suaminya tidak bisa saling melupakan di ajaklah kawina lari ibu kennang dan berpergian keluar kota dan melakukan perkawinan siri di Kelurahan Benteng.<sup>46</sup>

#### ***D. Pendapat Masyarakat Bangkala/Jeneponto Tentang Praktek Nikah Siri***

Akibat Hukum Perkawinan siri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Nikah siri yang tidak tercatat pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan apabila tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama, maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan legal formal, dan tidak ada akibat hukum, Nikah siri dapat merugikan istri dan anak.

Dari hasil pengamatan pada masyarakat kecamatan Bangkala menurut informan yang ada sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan siri para pihak pelaku memiliki latar belakang yang berbeda antara lain karena adanya ikatan pekerjaan sebagai PNS karena dalam ikatan kerja tersebut memiliki ketentuan untuk tidak boleh memiliki istri lebih dari satu dan proses cerai yang cukup rumit, karena salah satu pihak tidak mau di cerai secara resmi, karena adanya faktor ekonomi dimana salah satu pihak meninggalkan dengan alasan untuk bekerja di luar provinsi atau negeri dalam jangka waktu yang cukup lama akan tetapi tidak ada kabar dan tidak ada pemberian nafkah.

Faktor ekonomi tersebut untuk pengurusan berkas perkawinan dan perceraian memerlukan biaya yang tidak sedikit bagi pihak yang di tinggal cukup jauh dari kantor yang berwenang merupakan latar belakang masyarakat kecamatan bangkala kabupaten jeneponto memutuskan untuk melakukan pernikahan siri.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan ibu Kennang, Minggu Kelurahan Benteng 12 Juli 2020

Dari beberapa latar belakang tersebut menyebabkan pihak yang ingin menikah lagi memutuskan untuk melakukan perkawinan siri untuk upaya melegalkan secara agama dan terhindar dari zina dan fitnah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan siri bapak Dg Nai selaku Iman Dusun Desa Bontomanai dalam kegiatan wawancara mengatakan bahwa beliau sering menikahkan pasangan yang akan menikah siri dalam prosesnya melakukan perkawinan siri hampir sama dengan pernikahan pada umumnya yaitu adanya mempelai kedua, saksi wali dan mahar dan biasanya ada pencatatan berisi pelaksanaan dan batasan dalam menikah siri sesuai dengan perjanjian awal.<sup>47</sup>

Perkawinan Siri yang terjadi pada Kecamatan Bangkala terdapat berbagai tanggapan dari beberapa tokoh masyarakat mengenai perkawinan siri yang di akibatkan karena cerai di luar pengadilan:

1. Andi Baso

Beliau merupakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkala. Menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selama 2 tahun di akntor urusan agama di kecamatan bangkala karena sebelumnya beliau sempat menjabat sebagai penghulu di kantor urusan agama (KUA) Tamalatea selama 3 tahun. Dalam penjelasan tentang administrasi pernikahan di kantor urusan agama (KUA) kecamatan bangkala beliau menjelaskan bahwa pendaftaran pernikahan apabila akad di langsungkan di kantor biaya RP. 0 (Nol rupiah) dan apabila pelaksanaan pernikahan di rumah biaya mencapai 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).

Dalam usia ideal pernikahan, pak andi mengatakan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 yaitu usia laki-laki 19 tahun sedangkan usia perempuan 16 tahun. Kaitanya dengan pernikahn siri menurut pendapat pak andi kantor urusan agama

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Dg Nai, Minggu 5 juli 2020, di rumah Dg Nai di Desa Bontomanai Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

(KUA) tidak melayani, Pernikahan yang menurut sunah Roaul harus di sebar luaskan di umumkan tetapi kalau pernikahan siri tidak.

Nikah haruslah di sebar luaskan karena untuk mengetahui jelas statusnya dan apabila diam-diam menjadikan tidak jelas dalam semuanya baik di anak dan di status dalam KK ( Kartu Keluarga) dan lain-lain, menurut beliau dampak dari pernikahan siri sangat banyak di antaranya:

- a. Walinya adalah wali hakim, tidak bapaknya
- b. Hukum tidak dinamakan hukum dalam nasab bapaknya, nasab ikut ke ibunya
- c. Dalam segi hukum negara tidak diakui status hukumnya
- d. Tidak dapat waris karena nasab ikut ke ibunya (anak di luar nikah)<sup>48</sup>

## 2. Dg. Ngerang

Dg. Ngerang adalah warga Desa Bontomanai dusun Aranaya Kecamatan Bangkala, Beliau menjabat sebagai sebagai kepala dusun. Dalam pendapatnya tentang pernikahan siri ialah pernikahan menurut orang umum namun menurut agama tidak ada karena nikah siri maupun nikah umum sah hukumnya.

Menurut hukum agama islam yang penting ada syarat-syarat calon mempelai kedua. Saksi wali dan mahar karena di indonesia ada peraturan dari kantor urusan agama (KUA) dan pemerintah bahwa nikah yang tidak di catat di anggap nikah siri namun di agama hukumnya sah.

Dalam kegiatan wawancara Dg Ngerang beliau juga mengatakan bahwa sering menikahkan orang dalam pernikahan siri dalam satu tahun kurang lebih 20 orang baik masyarakat penduduk kecamatan bangkala maupun penduduk luar kecamatan bangkala dengan umur 18 sampai 50 tahun, dalam prosesnya melakukan pernikahan siri hampir sama dengan pernikahan umum ijab qabul pada

---

<sup>48</sup> Bpk Andi Baso, Kepala KUA Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

umumnya yaitu adanya mempelai kedua, saksi. Wali dan mahar dan biasanya ada pencatatan berisi pelaksana dan batasan dalam menikah siri atau sesuai dengan perjanjian awal.

### 3. Abd. Rahman Dg Rewa

Beliau merupakan Kepala Desa Bontomanai di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, menjabat menjadi kepala desa selama selama 4 tahun, dalam pendapatnya tentang perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara tetapi sah secara hukum agama. Perkawinan siri boleh dilakukan apabila dalam keadaan mendesak akan tetapi hanya beberapa bulan saja dengan artian perkawinan siri yang hanya sementara setelahnya menikah secara resmi di mata hukum negara, ini untuk meminimalisir kerugian yang diperoleh pemerintah desa dalam pencatatan tata administrasi khususnya dalam pencatatatn Kartu Keluarga (KK). Tetapi apabila perkawinan siri dilarang secara langsung akan menimbulkan masalah karena keyakinan masyarakat desa mengenai legalitas hukum agama yang lebih tinggi dari hukum negara mahal nya pembiayaan dan lamanya proses perceraian di pengadilan Agama.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan bapak Abd Rahman Dg Rewa, Kepala Desa Bontomanai Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari Penelitian yang telah Penulis lakukan di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyaknya Masyarakat Kecamatan Bangkala yang secara diam-diam melakukan perkawinan siri dan tidak di catatkan pada petugas pencatatan nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kua (KUA).
2. Berdasarkan Penelitian yang telah penulis lakukan mengenai perkawinan siri di Desa maroyaka Kecamatan Bangkala, di peroleh dari informasi bahwasanya faktor yang menyebabkan banyak perkawinan siri karena faktor Hamil diluar nikah di sebabkan karena pergaulan bebas maraknya informasi pornografi dan keluarga yang tidak harmonis, Akan memicu terjadinya perbuatan yang tidak di inginkan seperti hamil diluar nikah ketika hal ini terjadi maka keluarga harus menanggung malu yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Maka menikah secara siri yang menjadi pilihan dari keluarga S dan H
3. Adapun beberapa pendapat dari tokoh masyarakat mengenai perkawinan siri yang di akibatkan karena cerai diluar pengadilan. Abd Rahman beliau merupakan kepala Desa Bontomanai, Pendapatnya tentang perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara tetapi sah secara hukum agama. Perkawinan siri boleh di lakukan apabila dalam keadaan mendesak akan tetapi hanya beberapa bulan saja dengan artian perkawinan siri hanya sementara setelahnya menikah secara resmi di mata hukum negara. Ini untuk meminimalisir kerugian yang di peroleh pemerintah desa dalam pencatatan tata administrasi khususnya dalam



pencatatan kartu keluarga (KK). Tetapi apabila perkawinan siri di larang secara langsung akan menimbulkan masalah karena keyakinan masyarakat mengenai legalitas hukum agama yang lebih tinggi dari hukum negara mahal biaya pembiayaan dan lamanya proses perceraian di pengadilan agama.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Banyaknya Masyarakat Kecamatan Bangkala yang kurang paham dengan UU perkawinan No. 1 tahun 1974 sehingga terjadi perkawinan siri yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu diharapkan kepada tokoh agama masyarakat Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto mensosialisasikan kepada masyarakat setempat betapa pentingnya pencatatan perkawinan.
- 2 Bagi masyarakat yang tidak mampu memenuhi biaya pencatatan nikah baik di kelurahan, desa maupun Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkala hendaklah dibebankan biaya yang penting-penting saja mengurangi biaya pencatatan atau membebaskan biaya pencatatan dan tetap mendaftarkan identitas orang yang melakukan pernikahan pada buku registrasi pencatatan nikah lalu diterbitkan buku kutipan akta nikah.

## DAFTAR PUSTA

### Buku :

- Al-Jajiry Abdurahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Mesri: Dar Al-,T,Th), Jilid Vii.
- Abdurahman Al-Jajiry, *Al-Fiqh 'Ala Madzhahib Al- 'Arba'ah*, Jus Iv, Bairut: Dar Al- Kitab Al- Ilmiya, 1990.
- Abdurahman Al-Jajiry, *Kitab Al-Fiqh ' Alal-Al Madzahahib Al-Arba'ah* (Mesri: Darr Al- Irsyad,T,Th), Jilid Vii.
- Abdharman Al-Jasiry, *Al-Fiqh 'Ala Madzhahib Al- 'Arba'ah*, Jus Iv, Bairut :Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990
- Abdurahman, 1996, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. (Pt. Rineka Cipta Jakarta)
- Ali Al-Harawi, *Al-Zuwaj Al- 'Urfi Bayna Mawqif Al-Syar'i Wa Nadzrati Mujtama'* *Wa Ra 'yi' Al-Qunani*, Dalam [Http://](http://)
- Ali Al- Har Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqh* Prenada Media
- Awi, *Al-Zuwaj Al- 'Urfi Bayna Mawqif Al-Syar'i Wa Nadzarti Mujthama' Wa Ra 'yi Al-Qunani*, Dalam [Http://](http://)
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*,
- Burhanuddin S. 2010. *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta. Depertement Agama Op. Cit.
- Dian Putri Kusumaningsih, *Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah Siri Yang Ditawarkan Melalui Media Online* (Skripsi Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).
- Djoko Prakoso, 1 Ketut Murtika. 1987, *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan Indonesia*. Pt Bina Aksara Jakarta.

Irwan Masduqi, *Nikah Siri Dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail*.

Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Darusallam Perum Griya Suryo F-10, Cetakan 1, Yogyakarta, Maret 2004.

Tan Kamello Dan Syarifah Lisa Andriati, Op.Cit.

Musthafa Al-Siba'i, *Perempuan Di Antara Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*.

**Sumber Lain :**

Depertement Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (semarang karya toha putra semarang). 2011.

<http://www.Kompasiana.com/sangatgampangdandiingat/nikahsiri-siri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan5500ea333115d6f5123e4>.

www. Alrai.com/article/543688.html./ diakses pada jum'at, 13 Februari 2020.

Ratu, *Fenomena Pernikahan Sirri secra Online di Indonesia*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015)

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, cetkan pertama, 1974.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi berjudul ,  
**“IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI DI KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO”** bernama LIHARJA anak kedua dari pasangan bapak jamaluddin dan salinra Lahir di aranaya 03 juli 1998 mempunyai saudara laki-laki yang bernama Muhammad jalil.

Penulis memasuki jenjang pendidikan pertama SDN Aranaya (2004-2010) dan melanjutkan sekolah menengah pertama pada SMP Negeri 2 Bangkala Kab. Jeneponto (2011-2013) lanjut SMA Negeri 1 Bangkala (2014-2016) dan lulu di jurusan Peradilan Agama Prodi Hukum Keluarga Islam

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



Dokumentasi Wawancara dengan ibu Jumriati dalam ini dari beliau, pada hari jum'at 10 juli 2020 di desa Pallantikang. Dimana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis dan menjelaskan mengapa dia lebih memilih nikah siri karna paksaan kedua orang tua



Dokumentasi Wawancara dengan keluarga S.H. Pada hari jum'at 10 juli 2020 di desa marayoka. Dimana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis dan

menjelaskan mengapa dia lebih memilih nikah siri karena pergaulan bebas dan akhirnya hamil diluar nikah



Dokumentasi wawancara dengan keluarga H. Pada hari jum'at 10 juli 2020 di desa Tombo-Tombolo. Dimana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis dan menjelaskan mengapa dia lebih memilih nikah siri di karenakan mahalnya nuang panaik yang di minta oleh kedua orang tua istrinya.



Dokumentasi Wawancara dengan bapak yasbir pada hari Jum'at 10 juli 2020 di desa Bontomanai. Dimana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis

dan menjelaskan mengapa dia lebih memilih nikah siri karena faktor ekonomi sehingga dia t bapak yasbir tidak mencatatkan perkawinannya di KUA.





Dokumentasi wawancara dengan bapak sambe dan keluarga pada hari Jum'at 10 juli 2020. Kelurahan Bontorannu. Dimana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis dan menjelaskan karena tidak adanya restu dari kedua orang tua karena ada hubungan keluarga ( tidak baku cocok).



Dokumentasi Wawancara dengan keluarga Yuseng K. dan R. Pada hari sabtu 11 juli 2020. Kelurahan Pallengu. Dimana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis dan menjelaskan karena kurangnya pemahaman hukum atau buta hukum sehingga tidkak di catatkan pernikahannya di KUA.



Dokumentasi Wawancara dengan Kamaria. Pada hari sabtu 11 juli 2020. Desa Gunung silanu. Dimana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis dan menjelaskan dia menikah siri karena ingin menghalalkan hubungan badan saja.



Dokumentasi Wawancara dengan S Pada hari sabtu 11 juli 2020. Desa Jenetallasa. Dimana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis dan menjelaskan karena persoalan nafkah batin sehingga dia ikhlas untuk di jadikan istri nikah siri.





Dokumentasi Wawancara dengan keluarga bapak sampara pada hari sabtu 11 juli 2020 di Kelurahan Punagaya. Dimana beliau Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis dan menjelaskan tentang perkawinannya yang secara siri di karenakan faktor kelurahan punagaya jauh dari wilayah kota dan KUA sehingga pernikahan tidak di catatkan.



Dokumentasi Wawancara dengan bapak Baso pada hari sabtu 11 juli 2020 di Desa Kapita. Dimana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis dan menjelaskan. Tradisi setempat atau kebiasaan yang jadi salah satu maraknya perkawinan siri

## INSTRUMEN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : K  
Tempat/tanggal lahir : Bontumani, 20 Januari 1996  
Pendidikan : Si  
Pekerjaan : Honorer


Menerangkan bahwa,

Nama : Liharja  
NIM : 10100116129  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI DI KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO"** Demikian keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto,

Yang diwawancara

  
(.....)

## INSTRUMEN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : S  
Tempat/tanggal lahir : Makassar, 24 April 1984  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Wiraswasta

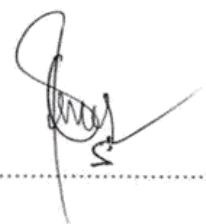
Menerangkan bahwa,

Nama : Liharja  
NIM : 10100116129  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI DI KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO"** Demikian keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto,

Yang diwawancara

  
(.....)

## INSTRUMEN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuseng RMY  
Tempat/tanggal lahir : Panakang - 01 Mei 1982  
Pendidikan : MA  
Pekerjaan : Petani

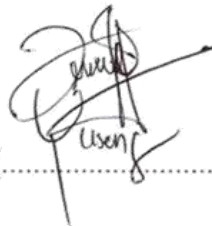
Menerangkan bahwa,

Nama : Liharja  
NIM : 10100116129  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI DI KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO"** Demikian keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto,

Yang diwawancara

  
(.....)

## INSTRUMEN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mintang  
Tempat/tanggal lahir : Arungkeke , 22 Agustus 1991  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : URT


Menerangkan bahwa,

Nama : Liharja  
NIM : 10100116129  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI DI KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO"** Demikian keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto,

Yang diwawancarai

  
(Mintang.....)

## INSTRUMEN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : A. RAHMATO. S. Fos .  
Tempat/tanggal lahir : MARCAGALERO 25 April 1958.  
Pendidikan : S.i  
Pekerjaan : Kepala Desa

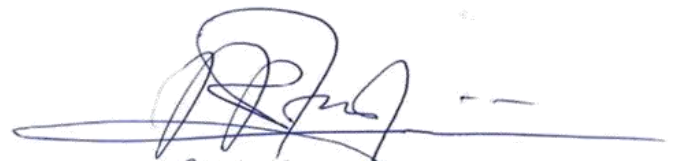
Menerangkan bahwa,

Nama : Liharja  
NIM : 10100116129  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI DI KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO"** Demikian keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto,

Yang diwawancara



(A. RAHMATO. S. Fos.)



## INSTRUMEN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Baso  
Tempat/tanggal lahir : Allu, 30 Agustus 1982  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa,

Nama : Liharja  
NIM : 10100116129  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI DI KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO"** Demikian keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jeneponto,

Yang diwawancara

  
(.....)

## INSTRUMEN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :   
Tempat/tanggal lahir : Aranaya 30 Juli 1997  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa,

Nama : Liharja  
NIM : 10100116129  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI DI KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO"** Demikian keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto,

Yang diwawancara



(.....Yasbir.....)

## INSTRUMEN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : S.H  
Tempat/tanggal lahir : Makassar - 20 Januari 1981  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Wiraswasta


Menerangkan bahwa,

Nama : Liharja  
NIM : 10100116129  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI DI KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO"** Demikian keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto,

Yang diwawancara

  
(.....S.H.....)

## INSTRUMEN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sukardi  
Tempat/tanggal lahir : Makassar 30 April 1996  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Petani

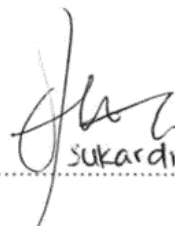
Menerangkan bahwa,

Nama : Liharja  
NIM : 10100116129  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI DI KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO"** Demikian keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto,

Yang diwawancara

  
(.....Sukardi.....)

## INSTRUMEN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H  
Tempat/tanggal lahir : Kallong Tala 28 September 1990  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : Buru Banguna / panjani Bano


Menerangkan bahwa,

Nama : Liharja  
NIM : 10100116129  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI DI KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO"** Demikian keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto,

Yang diwawancara

  
(.....)

## INSTRUMEN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Juwariati  
Tempat/tanggal lahir : Rokang. 28 februari 1998  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga


Menerangkan bahwa,

Nama : Liharja  
NIM : 10100116129  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI DI KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO"** Demikian keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto,

Yang diwawancara

  
(.....Juwariati.....)

## INSTRUMEN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Baso  
Tempat/tanggal lahir : Allu, 30 Agustus 1982  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa,

Nama : Liharja  
NIM : 10100116129  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRI DI KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO"** Demikian keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto,

Yang diwawancara

  
(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
KECAMATAN BANGKALA**

Alamat : Jln. Raya Allu Tlp. (0419) 2424551 KP 92352

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 100/ 54 /BKL/VI/2020

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 73.4/091/IP//DPMPTSP/VI//2020, Tanggal, 2 Juli 2020, maka pada prinsipnya Pemerintah Kec. Bangkala Kab. Jeneponto tidak Keberatan / memberi Izin Kepada Saudara ( i ) :

N a m a	: LIHARJA
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nomor Pokok	: 10100116129
Program Study	: HKI
Lembaga	: Universitas ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Aranaya Desa Bontomanai Kec. Bangkala Kab. Jeneponto
Tempat meneliti	: Kec. Bangkala Kab. Jeneponto

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul "

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP  
PRAKTEK NIKAH SIRIH DI KECAMATAN BANGKALA KAB. JENEPONTO**

Lama Penelitian : 2 Juli s/d 2 Agustus 2020.

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

- 1 Melapor ke Pemerintah Setempat dan selama mengadakan Penelitian mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati adat istiadat setempat
- 2 Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan
- 3 Surat izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bila mana pemegang izin ini ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Allu, 2 Juli 2020

Camat Bangkala

**ANDI PATAPPOI, S.Sos**

Pangkat : Pembina/IV/a  
NIP.198004152002121005.

**Tembusan di Sampaikan Kepada Yth :**

- 1 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Jeneponto di – Jeneponto
- 2 Kepala Kel. Bontorannu Kec. Bangkala Kab. Jeneponto  
Di - Bontorannu
- 3 Pertiagal





**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ishak Iskandar No. 30 Bontosunggu Telp. (0419) 2410044 Kode Pos 92311

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 73.4/091/IP/DPMTSP/VII/2020

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Nomor : 91/VII/REK-IP/DPMTSP/2020

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a	: LIHARJA
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nomor Pokok	: 10100116129
Program Studi	: HKI
Lembaga	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Aranaya Desa. Bontomanai Kec. Bangkala
Tempat Meneliti	: Kecamatan Bangkala Kab. Jeneponto

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRATEK  
NIKAH SIRI DI KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO**

Lamanya Penelitian : 02 Juli 2020 s/d 02 Agustus 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto Cq. Bidang Penelitian & Pengembangan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jeneponto, 02 Juli 2020

**KEPALA DINAS,**



**Hj. MERNAWATI, S. IP, M. Si**

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19771231 200212 2 015

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto;
2. Arsip.